SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)
Pembangunan Kantor UPT BKN Bandung
No. Registrasi : 6a38bbf6cf4ef

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Instasi Pemerintah	:	Pemerintah Kantor Regional III BKN
Nama Penanggungjawab	:	[redacted]
Jabatan	:	Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara
Alamat Penanggungjawab	:	Jl. Surapati No. 10 Kel. Cihaur Geulis Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung
Nomor Telp.	:	[redacted]
Sektor Kegiatan	:	Non KBLI Lainnya
Jenis Kegiatan	:	Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung
Lokasi Usaha/Kegiatan	:	Jl. Gedebage Utama/ Jl. Cimincrang RT. 001/RW. 06 Kel. Cimincrang Kec. Gedebage Kota Bandung, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Menyatakan kesanggupan:

1) Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2) Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3) Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan, dalam hal air limbah akan di buang ke badan air, bersedia untuk menyediakan instalasi pengolahan air limbah;
4) Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan tempat penyimpanan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah B3 dan sampah yang dihasilkan;
5) Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair dari kegiatan domestik untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6) Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi dalam hal terdapat dampak terhadap aspek transportasi;
7) Bersedia untuk melakukan penyusunan Amdal atau UKL-UPL dalam hal pengembangan kegiatan yang dilakukan menjadi wajib Amdal atau UKL-UPL sesuai dengan peraturan menteri yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL;
8) Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9) Bersedia untuk dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Menyatakan dengan sungguh-sungguh akan melaksanakan seluruh kesanggupan sebagaimana tersebut di atas. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka penanggung jawab kegiatan bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

KOTA BANDUNG, 22 Juni 2026
Tertanda,
TTD

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem Amdalnet

[redacted]
Pemerintah Kantor Regional III BKN

HASIL PENAPISAN OTOMATIS SISTEM INFORMASI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP AMDALNET
Pembangunan Kantor UPT BKN Bandung
No. Registrasi : 6A38BBF6CF4EF

Pemrakarsa	:	Kantor Regional III BKN
Nama Penanggung jawab	:	[redacted]
Jabatan	:	Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara
Alamat Penanggung jawab	:	Jl. Surapati No. 10 Kel. Cihaur Geulis Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung
Nomor Telp.	:	[redacted]
Email Pemrakarsa	:	[redacted]

Kegiatan

No	Detail Kegiatan	Alamat	Skala Besaran
1	NKU : - Nama Kegiatan : Pembangunan Kantor UPT BKN Bandung ID Izin : - Nomor KBLI 2020: - Nomor KBLI 2025: - Sektor : Non KBLI Lainnya Kegiatan : Utama Jenis Keigatan : Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	Provinsi : Jawa Barat Kab.Kota : Kota Bandung Alamat : Jl. Gedebage Utama/ Jl. Cimincrang Rt. 001/rw. 06 Kel. Cimincrang Kec. Gedebage Kota Bandung	**Besaran Utama** Luas Bangunan : 1,500.00 m2 **(SPPL)**

Informasi Penentuan Kewenangan

No	Kriteria	Checked	Hasil
Lokasi Kegiatan			
1	**Apakah Berlokasi di Daratan?**		
	- Tapak proyek berada di lintas provinsi	—	Pusat
	- Tapak proyek berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi	—	Provinsi
	- Tapak proyek berada di satu kabupaten/kota	✓	**Kabupaten/Kota**
2	**Apakah Berlokasi di Perairan Darat?**		
	- Berupa sungai dan/atau danau yang melintas atau melingkup lebih dari satu provinsi	—	Pusat
	- Berupa sungai dan/atau danau yang melintas atau melingkup lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi	—	Provinsi
	- Berupa sungai dan/atau danau yang berada di satu kabupaten/kota	—	Kabupaten/Kota
3	**Apakah Berlokasi di Perairan Laut?**		
	- Tapak proyek yang berada di perairan laut dengan jarak	—	Pusat

1. Dokumen ini sah, diterbitkan sistem Amdalnet berdasarkan data dari Pemrakarsa Pemerintah, tersimpan dalam sistem Amdalnet dan menjadi tanggung jawab Pemrakarsa Pemerintah.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuat Tanggal 22 Juni 2026, 11:37:10 WIB

Dicetak Tanggal 23 Juni 2026, 14:19:24 WIB

No	Kriteria	Checked	Hasil
	lebih dari 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas		
	- Tapak proyek yang berada di perairan laut dengan jarak kurang dari 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas	—	Provinsi
Kondisi rencana usaha dan/atau kegiatan			
1	Kegiatan berlokasi di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain	—	Pusat
2	Kegiatan sebagai proyek strategis nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundangan undangan	—	Pusat
3	Kegiatan berlokasi di satu kabupaten/kota dalam satu provinsi yang memiliki peran penting secara ekonomi, sosial, dan ruang bagi provinsi	—	Provinsi
Lampiran I Permen LH/BPLH Nomor 22 Tahun 2025			
1	Pembangunan dan/atau Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus	—	Pusat
Lampiran II Permen LH/BPLH Nomor 22 Tahun 2025			
1	Industri Pemodalan Asing di luar Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus	—	Provinsi

Hasil Penapisan

Jenis Dokumen : **SPPL**

Kewenangan : **Kabupaten**

1. Dokumen ini sah, diterbitkan sistem Amdalnet berdasarkan data dari Pemrakarsa Pemerintah, tersimpan dalam sistem Amdalnet dan menjadi tanggung jawab Pemrakarsa Pemerintah.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuat Tanggal 22 Juni 2026, 11:37:10 WIB

Dicetak Tanggal 23 Juni 2026, 14:19:24 WIB